PERATURAN BUPATI	
JUDUL	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR PERATURAN	8
TAHUN TERBIT	2026
ABSTRAK	Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana DPRK Aceh Utara sebagai salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama dengan Bupati yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara yang secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik dan tetap menjaga stabilitas Pemerintahan Daerah yang memberi manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan yang memadai untuk meningkatkan peran dan tanggungiawab lembaga Legislatif dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat Kabupaten Aceh Utara dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga antara Dewan dan Pemerintahan Daerah agar dapat berjalan harmonis dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dengan mengedepankan kepentingan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
MATERI YANG DIATUR	tunjangan kesejahteraan kesejahteraan berupa: 1. rumah negara dan perlengkapannya; 2. kendaraan perorangan dinas; dan 3. belanja rumah tangga.;

NO. BD	8
No TBD	-
JUMLAH PASAL/BAB	2 Pasal
JUMLAH HALAMAN	5 Halaman Batang Tubuh
PENJELASAN	-
CATATAN	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2026
LAMAN WEBSITE	jdih.acehutara.go.id